

LAPORAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK
DAPAT DIEKSEKUSI**

**(Studi Komparatif Putusan Perkara Pengadilan Negeri Atambua No.
17/Pdt.G/2012/Pn.Atb, Putusan Perkara Pengadilan Agama Manna No.
0295/Pdt.G/2016/Pa.Mna, dan Putusan Perkara Pengadilan Agama Manna
No. 0528/Pdt.G/2017/Pa.Mna)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dieksekusi, sehingga pihak yang menang perkara tidak memperoleh perlindungan hak secara efektif. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas fungsi peradilan sebagai pelindung hak subjektif, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) apa karakteristik yuridis yang menyebabkan putusan hakim perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Atb dan Nomor 0295/Pdt.G/2016/PA.Mna tidak dapat dieksekusi; dan (2) bagaimana perbandingan penyelesaian terhadap putusan deklarator yang non-eksekutabel dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Atambua No. 17/Pdt.G/2012/PN.Atb, Putusan Perkara Pengadilan Agama Manna No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mna, dan Putusan Perkara Pengadilan Agama Manna No. 0528/Pdt.G/2017/PA.Mna.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, yang diperkuat secara terbatas dengan pendekatan empiris melalui wawancara dengan advokat. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, serta data primer dari hasil wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan yang menjadi objek penelitian, putusan tingkat pertama pada dasarnya bersifat deklarator/konstitutif: PN Atambua hanya menyatakan status tanah sengketa sebagai aset kongsi dan sertifikat cacat hukum, sementara PA Manna hanya menetapkan ahli waris, objek warisan, dan porsi bagian, tanpa amar kondemnator yang memerintahkan perbuatan konkret yang dapat dieksekusi juru sita. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kelemahan perumusan petitum yang dominan deklaratif, diperkuat oleh pilihan hakim yang sangat ketat menerapkan asas *ultra petita*. Dalam perkara PN Atambua, penggunaan upaya hukum biasa (banding) tidak memperbaiki sifat non-eksekutabel putusan. Sebaliknya, dalam perkara PA Manna, permasalahan non-eksekutabilitas diatasi melalui gugatan baru (Perkara No. 0528/Pdt.G/2017/PA.Mna) yang secara tegas memohon amar kondemnator, sehingga menghasilkan putusan yang bersifat eksekutorial tanpa melanggar asas *ne bis in idem* karena berbeda *causa petendi* dan petitum.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kecermatan penggugat dalam merumuskan petitum pada perkara sengketa, serta perlunya kehati-hatian dalam memilih upaya hukum yang tepat ketika putusan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kata kunci: Putusan Hakim, Deklarator, Kondemnator, Eksekusi, Non-Eksekutabel.

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of court judgments that have obtained final and binding legal force but cannot be executed, resulting in the prevailing party being unable to obtain effective protection of their rights. Such a condition not only generates legal uncertainty and undermines the effectiveness of the judiciary in protecting subjective rights, but also has the potential to erode public confidence in court-based dispute resolution mechanisms.

The research problems addressed in this study are: (1) what juridical characteristics render Judgment No. 17/Pdt.G/2012/PN.Atb and Judgment No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mna non-executable; and (2) how the legal responses to non-executable declaratory judgments compare across Judgment No. 17/Pdt.G/2012/PN.Atb, Judgment No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mna, and Judgment No. 0528/Pdt.G/2017/PA.Mna.

This study employs a normative juridical method using statutory, case, conceptual, and comparative approaches, complemented in a limited manner by an empirical approach through an interview with a practicing advocate. The data consist of secondary data in the form of legislation, doctrinal writings, and court decisions, as well as primary data obtained from interviews. The data are analysed qualitatively.

The findings show that the first-instance judgments examined in this research are essentially declaratory or constitutive in nature. The Atambua District Court merely declared the disputed land to be a partnership asset and the land certificate to be legally defective, while the Manna Religious Court only determined the heirs, the estate assets, and the respective hereditary portions, without any condemnatory order instructing a concrete act capable of execution by a bailiff. This situation is primarily caused by weaknesses in the formulation of the *petitum*, which was predominantly declaratory, reinforced by the judges' strict adherence to the *ultra petita* principle. In the Atambua case, the use of an ordinary legal remedy in the form of an appeal did not cure the non-executability of the judgment and instead resulted in a decision declaring the lawsuit inadmissible (*niet ontvankelijk verklaard*). By contrast, in the Manna case, the issue of non-executability was resolved through the filing of a new lawsuit (Case No. 0528/Pdt.G/2017/PA.Mna) expressly requesting condemnatory relief, thereby producing an executory judgment without violating the *ne bis in idem* principle due to differences in the *causa petendi* and *petitum*.

This research recommends that plaintiffs exercise greater precision in drafting the *petitum* in contentious cases and that parties carefully consider the selection of legal remedies when a judgment does not accord with their expectations.

Keywords: Court Judgment, Declaratory Judgment, Condemnatory Judgment, Execution, Non-Executable.